

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah suatu lembaga yang berlandaskan asas kekeluargaan. Untuk menumbuhkan asas tersebut, peran pengurus dan anggota koperasi sangat mendukung keberlangsungan dan keberhasilan dalam koperasi. Pengurus dan anggota koperasi memerlukan pengetahuan yang cukup tentang kinerja keuangan. Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat di atasi. Selain itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong dirinya sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Untuk itu koperasi sebagai salah satu bangun usaha yang sesuai dengan UUD 1945, harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. (Skandar, 2008)

Pada perkembangannya koperasi berperan sebagai penggalang ekonomi rakyat serta memiliki jaringan usaha dan daya saing yang tangguh, guna mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan. Peradabannya koperasi mampu melakukan langkah-langkah ke depan dan terarah dan bisa melestarikan identitas koperasi agar dapat dilakukan seperti halnya yang dilakukan pelaku ekonomi lainnya. Peran koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan perekonomian demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri: demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Koperasi tidak hanya sebagai badan usaha yang dikelola secara kekeluargaan, namun koperasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjalankan usaha dalam perekonomian rakyat serta dapat meningkatkan perekonomian secara global.

Kinerja keuangan suatu koperasi dapat diperoleh dari informasi yang disajikan melalui suatu laporan keuangan pada suatu periode. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan koperasi, maka dapat diketahui kinerja keuangan koperasi tersebut mengalami laba atau rugi, yang nantinya bagi koperasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan jumlah besar kecilnya pinjaman kepada anggotanya serta dalam

memenuhi kebutuhan anggotanya. Untuk itu koperasi memerlukan modal besar yang diperoleh dari simpanan anggota, pinjaman dari bank, dan sumber-sumber lain.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa dalam koperasi terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur ekonomi dan sosial di mana koperasi berusaha memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien dan memiliki watak sosial dalam perkumpulan anggotanya. Koperasi dapat dijadikan sebagai wadah usaha bersama, sehingga setiap kelompok masyarakat dapat membentuk koperasi, misalnya personil Polda Sumut.

Koperasi PRIMKOPPOL adalah organisasi yang didirikan anggota polisi diluar struktur polri. Kewenangan pengusutan ada di pengurus. Penanggung jawabnya pengurus. Pengurus dipilih anggota. Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu koperasi kepolisian yang bertugas untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dari masyarakat pada umumnya. Koperasi Primkoppol Polda Sumut didirikan dalam lingkungan Polda Sumut, yaitu unit usaha yang didirikan di Polda dan beranggotakan para personil Polda Sumut. Koperasi Primkoppol didirikan sebagai sarana penyedia berbagai kebutuhan personil Polda Sumut baik itu istri dan anak. Koperasi Primkoppol dikelola oleh pengurus yaitu personil Polda Sumut itu sendiri dan dibina oleh Kayanma (Kepala Layanan Masyarakat) yang menjabat pada saat ini.

Tujuan berdirinya koperasi Primkoppol Polda Sumut, didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Primkoppol Polda Sumut merupakan salah satu koperasi yang mempunyai andil besar terhadap kesejahteraan anggotanya, koperasi ini di samping memasarkan prosuk barang-barang terdapat simpan pinjam terhadap anggotanya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi masyarakat sudah sewajarnya membentuk koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 1965 baru tersusun sampai dengan tingkat primer, itupun masih belum merata dan belum dibina langsung oleh Pimpinan Kepolisian Negara RI. (Halomoan, 2002)

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan

permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam buku laporan rapat anggota tahunan (RAT) Primkopol Polda Sumut tahun buku 2016-2019, usaha simpan pinjam yang dijalankan pada Primkopol Polda Sumut pada umumnya sangat membantu anggota koperasi, karna koperasi ini memberikan bunga yang sangat rendah bagi anggota yang melakukan pinjaman dibandingkan melakukan pinjaman pada Bank. Bunga yang diberikan oleh koperasi ini sebesar 1% dan para anggota meminjam untuk digunakan secara konsumtif. (Mutis 2004)

Pengelolaan keuangan tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke PRIMKOPPOL bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan. Dengan adanya kebijakan dana tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik. Kebijakan public di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan public harus dikendalikan. Implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan.

Pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap menjadi faktor untuk kebijakan public yang efektif. Lemahnya sumber daya pun menjadi salah satu faktor implementasi kebijakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan dengan semestinya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan melalui dokumen perencanaan kebijakan dana PRIMKOPPOL. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri sehingga penyusun rencana kebijakan dana PRIMKOPPOL akan mempengaruhi efektif tidaknya program kinerja di Polda Sumut.

Secara umum manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan dana. Selain itu, juga menyangkut dana dan pengendalian asset. Pengelolaan keuangan benar-benar harus terencana agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Pelaksanaan kebijakan Manajemen keuangan juga dapat mempengaruhi efektivitas kinerja. Istilah efektivitas kinerja sering digunakan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan yakni untuk menggambarkan tepat tidaknya sasaran yang dipilih perusahaan tersebut. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari manfaat atau keuntungan dari sesuatu yang dipilih untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. (Irham, 2013)

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang direncanakan. Pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan kegunaan bagi perusahaan tersebut. Ukuran dari efektivitas dapat dinilai dengan cara membandingkan pencapaian tujuan dari suatu aktivitas yang dilakukan dan bukan mengenai biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Istilah efektivitas dalam ruang lingkup organisasi atau perusahaan biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan program yang ditetapkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi atau perusahaan tersebut. (Jodenmot, 2009)

Efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, diantaranya yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata. Efektifnya pemberian pinjaman dalam rangka pemberdayaan dapat ukur melalui ketepatan waktu pengembalian pinjaman, tercapainya tujuan pemberdayaan yaitu si peminjam dapat berdaya atau mampu mengelola pinjaman dengan baik, kemudian perubahan nyata dimana si peminjam dalam menggunakan pinjamannya dan tidak lagi bergantung pada pinjaman serta terjadinya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Unutk melaksanakan program atau kegiatan ini harus di dukung dengan sumber daya manusia yang memadai yakni kemampuan, keahlian, dan keterampilan. Efektif tidaknya suatu program yang dilaksanakan dinilai dari kemampuan sumber daya manusia yang mnejalankannya dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Penilaian semacam ini bertujuan untuk mengukur kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Itu berarti sumber daya manusia telah mampu

menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan kinerjanya sudah efektif. Penilaian keefektifan suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendapat ahli untuk mengetahui apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu: 1. Produktivitas. 2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan berlaba. 5. Pencarian sumber daya.

Dalam manajemen keuangan pasti ada laporan keuangan yang akan dianalisis. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada, dan kemudian membuat keputusan rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaannya. Analisis Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, apakah perusahaan tersebut meningkat atau tidak sehingga perusahaan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya, maka diperlukan analisis rasio keuangan. Dimana dalam penelitian ini penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, rasio solvabilitas adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, rasio rentabilitas adalah mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan, sedangkan rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan.

Ada beberapa masalah yang terjadi di Primkoppol Koperasi Polda Sumatra Utara masih yaitu : Pertama, adanya personil yang mengajukan pinjaman tidak terlayanan akibat sisa gaji

bersihnya tidak mencukupi. Kedua, Masih adanya personil untuk mendapatkan pinjaman mencoba memanipulasi data dengan membesarkan gaji.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Terhadap Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi di Polda Sumatra Utara.”**

B. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, peneliti akan membatasi masalah menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, sehingga masalah yang akan diteliti menjadi lebih fokus. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kebijakan dana dan kelembagaan atas pengelolaan manajemen keuangan di Polda Sumut.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) terhadap manajemen keuangan di Polda Sumut?
2. Bagaimana dampak manajemen keuangan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Polda Sumut?
3. Bagaimana strategi yang harus dilakukan unit Primkoppol Polda Sumut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dana primer koperasi polisi?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) terhadap manajemen keuangan di Polda Sumut.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak manajemen keuangan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Polda Sumut.

3. Untuk mengetahui bagaimana yang harus dilakukan unit Primkoppol Polda Sumut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dana primer koperasi polisi.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat Sebagai referensi dan informasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai Efektivitas Kebijakan Dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL) Terhadap Manajemen Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi di Polda Sumatra Utara, serta sebagai syarat menyusun skripsi untuk menyelesaikan pogram Strata 1 (S1) Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bagi PRIMKOPPOL, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut dalam mengambil keputusan secara tepat di masa yang akan datang, khususnya mengenai kebijakan dana Primer Koperasi Polisi (PRIMKOPPOL).
3. Bagi Akademisi / Pembaca, Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya bagi jurusan Perbankan Syariah. Serta sebagai referensi dan informasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai manajemen keuangan.
4. Bagi Stakeholder, sebagai bahan informasi atau referensi yang diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pendataan dan pengelompokan SDM pada perusahaan dalam rangka peningkatan sistem kinerja.